



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara pengesahan nikah antara :

PEMOHON I, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sumber Jaya, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, alamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam, Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pga pada tanggal 29 Februari 2024, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Pemohon I dan Pemohon II* adalah suami isteri sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 30 Januari 2019, di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Dempo Tengah, dengan wali nikah adalah

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 1 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. *Bahwa sebelum akad nikah* Pemohon I berstatus Jejak berusia 23 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 16 tahun;
3. *Bahwa antara* Pemohon I dan Pemohon II *tidak ada halangan untuk menikah, baik karena perbedaan keyakinan, semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;*
4. *Bahwa perkawinan* Pemohon I dan Pemohon II *dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;*
5. *Bahwa selama menikah* Pemohon I dan Pemohon II *tidak pernah keluar dari Islam atau murtad dan tidak pernah bercerai;*
6. *Bahwa* Pemohon I dan Pemohon II *telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Pagar Alam, XXXXXXXXXXXXXXXX ;*
7. Bahwa sejak saat menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. *Bahwa sampai sekarang perkawinan* Pemohon I dan Pemohon II *tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II saat melangsungkan akad nikah masih berusia 16 tahun, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk sahnya sebuah perkawinan dan keperluan administrasi lainnya;*
9. Bahwa Pemohon adalah keluarga kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan, Dempo Tengah, Nomor 463/406/CJ/Dp.T/2023, tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagaram cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 2 dari 12 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019, di Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara;

Atau jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di persidangan ;

Bahwa atas pertanyaan Hakim kepada para Pemohon, para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pernikahan para Pemohon tidak tercatat dikarenakan saat pernikahan para Pemohon pada bulan Januari 2019, usia Pemohon II belum mencapai usia perkawinan, karena masih berusia 15 tahun 5 bulan;

Bahwa pernikahan secara *sirri* tersebut sudah merupakan hasil dari perbincangan dan kesepakatan keluarga, sehingga tidak ada alasan khusus apapun yang melatarbelakangi pernikahan *sirri* tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon ternyata para Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan itsbat nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan para Pemohon dimuka persidangan ditemukan fakta bahwa alasan

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 3 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tidak melakukan pernikahan secara tidak tercatat adalah karena saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan, Pemohon I masih berusia 15 tahun 5 bulan, dan tidak ada hal lain yang mendesak melatarbelakangi perkawinan yang tidak tercatat tersebut, dan hanya merupakan kesepakatan dari para pihak keluarga saja, terhadap fakta tersebut Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon II yang masih berusia 15 tahun 5 bulan dan menjadikan alasan pernikahan sudah ingin menikah karena sudah merasa dewasa sebagai alasan melakukan pernikahan tidak tercatat, menurut Hakim bukanlah menjadi alasan yang tepat, melainkan karena para Pemohon hanya ingin memudah-mudahkan urusan saja. Padahal jika para Pemohon beriktikad baik, usia 15 tahun 5 bulan bagi Pemohon II tidak menjadi penghalang bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tercatat, jika memang pernikahan tersebut harus dilaksanakan, dengan syarat Pemohon II harus mendapatkan izin dispensasi kawin terlebih dahulu, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Pemohon II. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa permohonan pengesahan nikah para Pemohon tidak beralasan.

Menimbang, bahwa *maqasidhus syari'ah* dari perkawinan adalah agar manusia dapat hidup damai penuh dengan kasih sayang satu dengan yang lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanya pemenuhan kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan, sehingga dengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan kotor yang bisa menimbulkan kejahatan dan kerusakan. Keturunan yang diharapkan oleh syari'ah adalah keturunan yang dapat menjalankan aturan-aturan Allah yang berupa perintah dan larangan. Sebab terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kemaslahatan dan kedamaian dalam dunia ini, sedangkan dengan tidak terlaksananya perintah-perintah Allah akan terciptanya kerusakan dan kemadlaratan dalam dunia ini. Seorang pria mempunyai naluri seks yang

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 4 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dibandingkan dengan wanita, oleh karena itu Allah SWT membolehkan seorang pria untuk beristri lebih dari satu orang istri sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 3. Dengan naluri biologis seorang pria boleh menikahi wanita kapan saja ia mau dan dimana saja ia kehendaki, selama istri itu tidak melebihi empat orang, dengan naluri biologisnya pula seorang pria akan berbohong bahwa ia belum beristri, atau sudah beristri tetapi belum melebihi dari empat istri. Oleh karena itu tujuan syari'ah tidak akan tercapai jika tidak ada keterlibatan pihak lain yang berupa lembaga yang telah diberi wewenang oleh pemerintah untuk menanganinya. Dengan lembaga tersebut perkawinan seorang pria dengan seorang wanita akan tercatat rapi, sehingga tidak ada lagi penipuan dan kebohongan dalam perkawinan, yang kesemuanya itu akan merugikan pihak wanita.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah keharusan, keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan transaksi yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ..."*

Menimbang, bahwa berbeda dengan akad jual-beli, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, sehingga akad jual-beli saja yang tidak sekuat akad perkawinan al Quran memerintahkan untuk mencatatnya, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak atau janji yang kuat atau dalam bahasa agama dikenal dengan ميثاقاً غليظاً, hal ini bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 5 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persahabatan biasa, ikatan perkawinan adalah hubungan diantara suami-istri, ibu-anak dan bapak-anak, yang bertujuan untuk mengambil manfaat, memiliki dan mengeksploitasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesakralan nilai tersebut, pernikahan haruslah dicatatkan dalam akta resmi. Al-Quran memandang perkawinan itu dalam kedudukan yang tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan, maupun kehidupan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan derajat perkawinan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas kewajibannya dengan ijab dan qabul, dan kesaksian beberapa orang saksi. Disamping itu, al-Quran pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu, akan tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang demikian itu senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia kepadanya meskipun terjadi hal-hal yang menggangukannya, yang berupa kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “ *Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/Inpres RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat*”, sedangkan ayat (2) berbunyi “*Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah*”. Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini menurut saya berarti wajib atau rukun, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan kemadlaratan, mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan hukumnya wajib.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum itu adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginfel*). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 6 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan, namun perkawinan tersebut tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 membuka peluang bagi perkawinan yang tidak tercatat tersebut dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal : (a) *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.* (b) *Hilangnya Akta Nikah.* (c) *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.* (d) *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.* (e) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.* Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulnya permohonan pengesahan nikah.

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 7 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat yang terpenuhi merupakan keharusan bagi dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H, dalam tulisan beliau berjudul "*Problematika Perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*" yang disampaikan dalam Rakernas Perdata Agama menyatakan bahwa apabila perkawinan dibawah tangan sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau di itsbatkan juga oleh pengadilan Agama), dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

- Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya Undang-undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya Undang-Undang ini menjadi terabaikan.
- Tujuan Normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan.
- Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.
- Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tatacara pencatatan Perkawinan, yang mungkin akan dikemas dengan berbagai perjanjian perkawinan, antara lain bahwa unsur pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi pada waktu yang kan datang dengan tanpa adanya suatu kepastian, yang mengundang ketidak pastian nasib wanita

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 8 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(isteri) yang menurut amanat Undang-undang Perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi.

- Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka peluang untuk putusanya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah tangan ini hanya diikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka untuk suasana seperti ini adalah sama seperti masa Tahkim dan Muhakam dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekuensi logis formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan.
- Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan tidaklah hanya berdampak kepada para pihak berperkara, putusan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan terabaikan. selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diungkap di atas nyatalah bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di masa untuk mengakses informasi berkaitan dengan keharusan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama sangat mudah untuk dilakukan, dan juga dilaksanakan di KUA Kecamatan Dempo Tengah yang akses untuk menuju Kantor Urusan Agama relatif mudah, para Pemohon juga melangsungkan pernikahan tersebut secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah pelanggaran

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 9 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap peraturan perundang-undangan, namun para Pemohon tetap melangsungkan pernikahannya tersebut dengan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang logis dan faktor darurat.

Menimbang, bahwa tindakan para Pemohon yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak yang berwenang tersebut menurut Hakim adalah sikap menganggap *enteng* atau mudah-mudahan kewajiban pencatatan nikah, oleh karena itu Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa saat para Pemohon menikah, Pemohon II masih berusia 15 tahun 5 bulan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*". Namun para Pemohon tidak menempuh jalur sebagaimana yang ditawarkan ketentuan di atas.

Menimbang, bahwa dalam Surat Penjelasannya, Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Panitera Mahkamah Agung RI. Menjelaskan bahwa "Syarat administrasi tersebut untuk perikahan di bawah umur harus ada izin dispensasi dari pengadilan dan apabila

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 10 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan. Dengan demikian berdasarkan fatwa hukum tersebut, Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon adalah perkawinan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas nyatalah bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan juga akad nikah Pemohon I tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi karena para Pemohon telah mendapat izin oleh Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam Tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor 356/KPA.PA.W6-A11/HK.05.2/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024 untuk berperkara secara *prodeo* atau cuma-cuma, maka para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini untuk kemudian dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pagar Alam Tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 11 dari 12 hlm



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pagar Alam Tahun 2024 sejumlah Rp.0 (NoI Rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam pemeriksaan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H., sebagai hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Syahrin Mubarak. S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Syahrin Mubarak, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----	Rp	0,00
2. Biaya proses -----	Rp	0,00
3. Biaya Panggilan -----	Rp	0,00
4. PBT T-----	Rp	0,00
5. Biaya PNBP -----	Rp	0,00
6. Redaksi -----	Rp	0,00
7. Meterai -----	Rp	0,00

Jumlah biaya Perkara Rp 0,00

(Nol rupiah)

Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Pga.
Hlm 12 dari 12 hlm